

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PENGENDALIAN EKSTERNAL TERHADAP KEBERADAAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Desi Waty Febryna¹

Abstract

The inherent risks in firms' operating activities require firms to establish effective risk management. The complexity of modern bussiness forces firms to put more efforts to reduce negative effects of uncontrolled risks. Risks management is becoming crucial Risk Management Committee has been widely established in many public firms. This committee is under the supervision of Board of Commissioners. This study examine the effects of Corporate Governance, the characteristics of the company and auditor quality on the existence of Risk Management Committee of non-financial public companies. This study uses secondary data from annual reports of non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2008-2013. Using logistic regression, the results show that frequency of board meetings, concentration of ownership and size of the company affects the existence of the Risk Management Committee (RMC).

Keywords: Risk Management Committee, auditor quality, corporate governance, frequency of board meeting.

1. PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi organisasi dari setiap kemungkinan yang merugikan melalui suatu proses penilaian risiko yaitu mengidentifikasi risiko, menilai dan mengevaluasi sehingga risiko tersebut dapat meminimalkan dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan efisien (KNKG, 2012). Setiap perusahaan pasti memiliki potensi risiko yang akan dihadapi atas aktivitas operasi perusahaan sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko tersebut yang juga dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dimana aspek pemantauan serta pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko yang efektif (Andarini dan Indira, 2012).

Pengawasan terhadap sistem manajemen risiko dalam suatu perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab Dewan Komisaris, sedangkan Dewan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko (Setyarini, 2011). Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus (Sutedi, 2011). Pembentukan komite disesuaikan dengan ukuran, sektor bisnis dan kebutuhan perusahaan dan diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasi perusahaan seperti Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi dan Komite Manajemen Risiko.

Beberapa perusahaan masih memberikan pengawasan atas risiko kepada Komite Audit untuk mencapai risiko yang sesuai (Krus dan Orowits, 2009 dalam Dyaksa, 2012).

¹ Alumni Prodi Akuntansi, FEB Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Dalam bidang pengawasan perusahaan, Komite Audit bertanggung jawab mengawasi perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memantau proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Surya dan Ivan, 2006). Tugas pengawasan terhadap manajemen risiko membutuhkan keahlian dan pengalaman yang mencakup seluruh wilayah operasi perusahaan beserta risikonya seperti risiko teknologi, risiko produk, praktek penjualan, risiko kredit, risiko peraturan dan lain-lain (Bates dan Robert, 2009). Dengan semakin luasnya tanggung jawab Komite Audit atas pengawasan terhadap risiko dan manajemen risiko operasi perusahaan maka beberapa perusahaan menerapkan fungsi pengawasan risiko tersebut pada suatu komite khusus pengawas manajemen risiko yang disebut *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Risiko).

Keberadaan *Risk Management Committee* (RMC) merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mengelola risiko dan mengurangi dampak biaya keagenan (Pratika, 2011). Menurut Dyaksa (2012) pengungkapan RMC dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan kepada pihak eksternal. Pengungkapan RMC merupakan bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain dalam pengawasan sistem manajemen risiko.

RMC dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Hal dapat dilihat pada Piagam Komite Manajemen Risiko yang dimiliki perusahaan yang berisi pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja RMC. Keberadaan RMC merupakan salah satu wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena keberadaan RMC menganut prinsip transparansi dimana perusahaan yang memiliki RMC akan mengungkapkan informasi mengenai risiko dan manajemen risiko perusahaan serta pengawasan yang dilakukan oleh RMC. Disamping itu, keberadaan RMC menerapkan prinsip akuntabilitas, dengan adanya RMC maka fungsi dan peran atas pengawasan risiko dan manajemen risiko lebih jelas yang dilakukan oleh RMC dan hal ini membantu dalam meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Aktivitas perusahaan tidak terlepas dari risiko. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung dari seberapa baik kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko dan mengawasi manajemen risiko tersebut. Perusahaan tidak dapat dinilai baik dengan mengabaikan risiko dan pengungkapan risiko pada laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan RMC ini membantu pengawasan yang berfokus pada risiko dan manajemen risiko.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas hubungan karakteristik dewan dan perusahaan terhadap keberadaan RMC. Subramaniam dkk., (2009) melakukan penelitian pada 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia (*Australia Stock Exchange*) dan menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO Independen dan ukuran Dewan Komisaris yang besar. Yatim (2009) melakukan penelitian dengan sampel perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Malaysia. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen, ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis dan penggunaan KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. Andarini dan Indira (2012) melakukan penelitian pengaruh karakteristik Dewan Komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan RMC perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif dengan keberadaan RMC.

Keberadaan RMC pada perusahaan non finansial masih bersifat sukarela (*voluntary*). Berbeda dengan perusahaan perbankan yang telah memiliki peraturan khusus yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 dan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, bank wajib membentuk RMC. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah ingin

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC pada perusahaan non finansial yang masih bersifat sukarela.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Manajemen Risiko

Risiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012). Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya (Tampubolon, 2004). Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui. Bertambah kompleksnya kegiatan usaha, maka perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan karena risiko dapat mengakibatkan kehancuran organisasi perusahaan.

Risiko dapat dikelola dengan manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan mengelola risiko sehingga organisasi bisa dapat bertahan. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dapat dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker, dkk., dalam Yatim, 2009).

Risk Management Committee

Dewan Komisaris merupakan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan strategis dan operasional perusahaan termasuk diantaranya memastikan bahwa manajemen risiko perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien (KNKG, 2012). Oleh karena itu, Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan baik.

Keberadaan *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Risiko) di Indonesia mulai berkembang dan meningkat terutama pada perusahaan perbankan sejak 2003. Pada perusahaan non finansial, RMC masih bersifat sukarela (*voluntary*) tidak seperti dengan perusahaan perbankan bersifat *mandatory* yang telah memiliki peraturan khusus yang menyatakan bahwa setiap bank wajib mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporan tahunannya. Penggunaan istilah *Risk Management Committee* (RMC) dikenal pada perusahaan non finansial sedangkan pada sektor perbankan lebih dikenal dengan sebutan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko maupun Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan fungsi yang sama. Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu prasyarat yang harus dibentuk dalam sektor perbankan terutama bagi Bank Umum. Keberadaan RMC yang bersifat *mandatory* pada perusahaan perbankan telah diatur dalam peraturan yang dijelaskan pada surat Keputusan Menteri BUMN No.-117/M-MBU/2002 pasal 14 mengenai yang mengatur tentang komite-komite yang dibentuk oleh Komisaris/Dewan Pengawas yang salah satunya adalah Komite Asuransi dan Risiko Usaha atau yang disebut juga sebagai *Risk Management Committee*. Selain itu, peraturan lain terkait keberadaan Komite Manajemen Risiko yaitu PBI No.5/8/PBI/2003 dan PBI No.8/4/PBI/2006. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Dewan Komisaris

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*, dimana dalam sebuah perusahaan terdapat dua badan terpisah yaitu Dewan Komisaris sebagai dewan pengawas yang mengawasi kebijakan terhadap aktivitas perusahaan dan Dewan Direksi sebagai dewan manajemen yang bertugas mengelola dan sebagai pelaksana atas kebijakan. Sebagai dewan pengawas, Dewan Komisaris harus memperhatikan jumlah dari anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris karena dalam ukuran Dewan Komisaris yang besar terdapat sumber daya yang besar (Subramaniam, dkk., 2009). Dengan sumber daya yang besar, ada kemungkinan bagi Dewan Komisaris untuk membentuk suatu komite yaitu *Risk Management Committee* (RMC) dari sumber daya Dewan Komisaris yang dimiliki dan dengan keberadaan RMC diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko atas informasi yang diperoleh mengenai potensi-potensi risiko yang akan dihadapi dan bagaimana kebijakan terhadap risiko tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratika (2011) menyatakan bahwa ukuran Dewan berpengaruh positif dan signifikan dengan keberadaan RMC. Pratika (2011) menjelaskan dewan yang memiliki jumlah anggota yang besar memiliki peluang yang lebih baik untuk memilih direktur dengan kemampuan yang kompeten untuk mengatur komite-komite yang dibawahinya termasuk RMC. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Subramaniam, dkk., (2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC. Dalam ukuran Dewan Komisaris yang besar, pertukaran keahlian, informasi dan pikiran juga akan terjadi lebih luas, sehingga akan lebih mudah untuk menemukan sumber daya yang tepat dalam Dewan Komisaris untuk dialokasikan dalam tugas RMC. Hal ini juga didukung oleh penelitian Utomo (2012) yang menyatakan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Semakin tinggi ukuran Dewan Komisaris maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC).

Proporsi Komisaris Independen

Sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan untuk menjaga reputasi (Yatim, 2009). Perusahaan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan dan dengan membentuk RMC mungkin dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggung jawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi Komisaris Independen yang rendah (Setyarini, 2011). Dengan pengangkatan Komisaris Independen dengan proporsi yang lebih besar akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan cenderung akan membentuk RMC untuk membantu pengawasan terhadap risiko dan sebagai wujud pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penelitian Ratnawati (2012) menunjukkan bahwa independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Komisaris Independen dianggap mampu memberikan pengawasan yang lebih baik dengan melakukan pengecekan secara independen terhadap pimpinan. Komisaris Independen juga dinilai memiliki motivasi

yang kuat untuk menjaga reputasinya (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ratnawati, 2012). Hasil yang konsisten juga ditemukan oleh Yatim (2009) dan Utomo (2012).

Berdasarkan argumen teoretis diatas, hubungan independensi dan keberadaan RMC dinyatakan dalam hipotesis berikut ini:

H₂ : Semakin tinggi Proporsi Komisaris Independen maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC)

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Menurut Cotter dkk., (1998) dalam Sambera dan Wahyu (2013) frekuensi rapat Dewan Komisaris merupakan sumber penting untuk menciptakan efektivitas dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai pusat pelaksana pengendalian internal perusahaan yang memiliki peran serta fungsi pengawasan, harus secara terus menerus mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan sehingga diperlukan jumlah pertemuan yang cukup sering (Habibah, 2013). Intensitas rapat yang kurang menyebabkan Dewan Komisaris kurang begitu memperoleh informasi yang lengkap mengenai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan kemudian hari (Kusuma, 2012). Oleh karena itu, semakin sering intensitas rapat Dewan Komisaris maka akan meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang kondisi perusahaan terutama risiko perusahaan dan pemantauan manajemen risiko yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang mendukung pembentukan RMC.

Kusuma (2012) menemukan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif dengan keberadaan struktur RMC. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Wahyuni dan Puji (2012) yang menemukan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan Komite Manajemen Risiko. Frekuensi rapat yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Insiden pelaporan keuangan akan turun jika Dewan Komisaris memperoleh informasi yang berkualitas terhadap manajemen risiko atau tidak ada asimetri informasi yaitu melalui frekuensi rapat yang sering karena pelaporan kondisi perusahaan semakin intensif dan informasi yang diperoleh semakin berkualitas untuk menghasilkan keputusan yang relevan, akurat dan tepat waktu. Hal ini akan mendorong perusahaan menyelenggarakan komite yang mengawasi risiko untuk membantu pengawasan Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan argumen diatas, hubungan antara frekuensi rapat Dewan Komisaris dan keberadaan RMC dinyatakan dalam hipotesis berikut ini:

H₃ : Semakin tinggi frekuensi rapat Dewan Komisaris maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC).

Risiko Pelaporan Keuangan

Risiko pelaporan keuangan yang tinggi biasanya ditemui pada perusahaan dengan proporsi asset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan. Risiko pelaporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai kinerja ataupun risiko keuangan perusahaan selama satu periode dan bagaimana manajemen dari perusahaan menggunakan tanggung jawabnya kepada pemilik (Ratnawati, 2012). Risiko pelaporan keuangan berhubungan erat dengan *earnings retention*, dimana manajemen cenderung mempertahankan tingkat perusahaan yang stabil, yang bertujuan agar kinerja manajemen terlihat bagus (Sambera dan Wahyu, 2013).

Ratnawati (2012) menunjukkan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberadaan RMC. Hasil ini juga didukung Sambera dan Wahyu (2013) dan Subramaniam, dkk., (2009) yang menemukan risiko pelaporan keuangan berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Ketika suatu risiko pelaporan keuangan meningkat, maka perusahaan mungkin memandang perlu untuk membentuk komite baru seperti RMC yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko dan mengawasi manajemen risiko tersebut.

Berdasarkan argumen diatas, maka hubungan risiko pelaporan keuangan dan keberadaan RMC dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : Semakin tinggi risiko pelaporan keuangan maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan RMC

Konsentrasi Kepemilikan

Jumlah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan oleh individu atau kelompok adalah berbeda-beda. Demsetz dan Lehn (1985) dalam Putri (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara risiko bisnis dan konsentrasi kepemilikan. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan informasi. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan termasuk dalam mempengaruhi keberadaan RMC dalam suatu perusahaan karena setiap pemilik saham bisa menentukan apakah RMC diperlukan atau tidak. Menurut *agency theory*, konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi biaya agensi karena pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan pengawasan pada perusahaan dengan memberikan suara untuk perusahaan membentuk RMC.

Penelitian Utomo (2012) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberadaan RMC. Meizaroh dan Jurica (2011) mendukung penelitian Utomo (2012) menyatakan bahwa semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan risiko informasi dalam perusahaan serta bagaimana perusahaan memiliki kinerja pengawasan internal yang lebih terstruktur terhadap risiko tersebut. Demikian dengan penelitian Syifa (2013) dan Sari (2013) yang mendukung bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap keberadaan komite pengawas risiko yaitu RMC. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan saham pada satu kelompok atau individu maka akan semakin besar tuntutan untuk pengawasan risiko atas investasi saham yang dimilikinya pada perusahaan sehingga kemungkinan adanya tekanan untuk perusahaan membentuk suatu komite yang dapat mengawasi pelaksanaan sistem manajemen risiko dalam mengendalikan risiko yaitu RMC.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan Risk Management Committee (RMC)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil suatu perusahaan (Ratnawati, 2012). Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan informasi yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik (Cowen, dkk., 1987 dalam Anisa, 2012). Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibandingkan perusahaan kecil yaitu dengan membentuk RMC yang bertujuan untuk mengawasi berbagai risiko dan sistem manajemen risiko atas dampak kompleksitas perusahaan yang memiliki skala besar.

Disisi lain, *Agency theory* menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Anisa, 2012). Hal ini sejalan dengan pernyataan Carcello, dkk., (2005) dalam Subramaniam, dkk., (2009) bahwa *agency cost* menjadi lebih tinggi pada organisasi yang lebih besar. Sebagai upaya untuk mengurangi *agency cost* maka perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil salah satunya adalah informasi mengenai pengungkapan keberadaan RMC. Dengan mengungkapkan RMC dalam laporan tahunan memberikan sinyal bahwa perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik dengan adanya komite khusus untuk mengawasi pelaksanaan sistem manajemen risiko.

Penelitian Ratnawati (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. Pada perusahaan *go public* Indonesia, ukuran perusahaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan RMC secara sukarela. Sejalan dengan penelitian Andarini dan Indira (2012) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC menyatakan menurut kondisi Indonesia, RMC akan lebih banyak dibentuk oleh perusahaan dengan biaya agensi lebih tinggi, dimana *economic of scale* juga cenderung tinggi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Wahyuni dan Puji (2012) bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi keberadaan RMC karena perusahaan besar menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemerintah sehingga penyelenggaraan RMC merupakan hal yang penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan untuk melindungi asset dengan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan Risk Management Committee (RMC)

Reputasi Auditor

Reputasi auditor eksternal adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki nama baik, prestasi dan memperoleh kepercayaan dari publik yang dimiliki oleh KAP tersebut (Sari, 2013). Auditor eksternal *Big Four* dipandang mempunyai reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Berdasarkan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen sangat diperlukan pada hubungan antara *principals* dan *agents* sebagai mediator. Chen dkk., (2009) dalam Andarini dan Indira (2012) menyatakan bahwa auditor eksternal *Big Four* yang juga merupakan auditor independen secara signifikan berpengaruh positif dengan pembentukan komite baru secara sukarela. Dengan adanya motivasi akan kebutuhan

kualitas audit dan perlindungan akan reputasi auditor eksternal *Big Four* maka perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal *Big Four* memiliki pengaruh lebih besar untuk membentuk RMC karena RMC dipandang sebagai dukungan tambahan ketika auditor sedang menilai sistem *monitoring* risiko internal dan manajemen risikonya. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh auditor *Big Four* cenderung membuat pemakai laporan keuangan lebih percaya dan memberikan sinyal positif bagi perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan Yatim (2009) bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap keberadaan RMC. Perusahaan yang laporan tahunannya diaudit oleh auditor eksternal *Big Four* cenderung untuk mengatur dan merekomendasikan pembentukan RMC. Keberadaan RMC dipandang sebagai dukungan tambahan yang baik saat auditor melaksanakan penilaian sistem *monitoring* risiko internal perusahaan (Diani, 2013). Penelitian ini juga didukung oleh Dyaksa (2012) dan Utomo (2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₇ : Semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi kemungkinan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC)

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2013. Alasan pemilihan perusahaan non finansial dalam penelitian ini adalah karena pengungkapan *Risk Management Committee* (RMC) masih bersifat sukarela (*voluntary*) pada perusahaan non finansial dimana belum adanya peraturan yang memandatkan perusahaan non finansial untuk membentuk RMC. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2008-2013 dengan alasan ingin mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan selama 6 (enam) tahun sejak krisis keuangan global 2008 terkait pada pengawasan dan pemantauan sistem manajemen risiko perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
1.	Perusahaan non finansial yang tercatat di BEI secara berturut-turut tahun 2008-2013.	314	314	314	314	314	314	1884
2.	Perusahaan non finansial yang laporan tahunannya tidak ditemukan dari berbagai sumber.	(136)	(45)	(28)	(24)	(28)	(16)	(277)
3.	Laporan tahunan yang tidak memiliki data persediaan	(4)	(6)	(11)	(11)	(7)	(7)	(46)
4.	Laporan tahunan yang tidak memiliki data frekuensi rapat dewan komisaris.	(56)	(74)	(66)	(58)	(38)	(44)	(336)
	Jumlah Sampel Penelitian	118	189	209	221	241	247	1225

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberadaan RMC. Dalam penelitian ini, keberadaan RMC diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC (baik sebagai komite yang terpisah atau komite yang tergabung dengan Komite Audit) dalam laporan tahunannya diberi nilai 1 (satu) dan nilai 0 (nol) jika perusahaan tidak memiliki RMC dalam laporan tahunannya (Subramaniam, dkk., 2009).

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) yaitu :

a. Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Ukuran Dewan menunjukkan besarnya jumlah anggota yang berada pada Dewan. Dalam penelitian ini, ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada didalam perusahaan (Subramaniam, dkk., 2009).

b. Proporsi Komisaris Independen (Prop_KI)

Dalam penelitian ini proporsi Komisaris Independen diukur dengan menyatakan dalam persentase jumlah anggota Komisaris Independen pada Dewan Komisaris dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Dewan Komisaris pada perusahaan (Subramaniam, dkk., 2009).

$$\text{Prop_KI} = \frac{\text{Jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dewan Komisaris}}$$

c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK)

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah berapa kali dalam satu tahun Dewan Komisaris mengadakan rapat (Sutaryo, dkk., 2010 dalam Wahyuni dan Puji, 2012). Dalam penelitian ini, frekuensi rapat Dewan Komisaris diukur dengan jumlah rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris dalam satu tahun (Yatim, 2009).

d. Reputasi Auditor (KAP)

Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* diberi nilai 1 (satu) dan nilai 0 (nol) jika tidak menggunakan auditor eksternal *Big Four* (Subramaniam, dkk., 2009).

e. Risiko Pelaporan Keuangan (Risk_LK)

Dalam penelitian ini, risiko pelaporan keuangan diukur dengan menjumlah piutang dan persediaan dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, dkk., 2009).

$$\text{Risk_LK} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

f. Konsentrasi Kepemilikan (Kons_Kep)

Konsentrasi kepemilikan merupakan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Syifa, 2013). Kepemilikan saham perusahaan dapat mempengaruhi keberadaan RMC dalam suatu perusahaan (Utomo, 2012). Dalam penelitian ini, konsentrasi kepemilikan saham diukur dengan jumlah persentase kepemilikan saham terbesar dalam perusahaan yang dilaporkan di laporan tahunan (Putri, 2013).

g. Ukuran Perusahaan (Uk_Prs)

Dengan perusahaan membentuk RMC diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan terhadap pengendalian risiko kebangkrutan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menghitung *log* normal jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Chen dkk., 2009 dalam Andarini dan Indira 2012).

Alat Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi logistik (*Logistic Regression*). Regresi logistik dipilih karena dalam penelitian ini menggunakan variable dependen yang *dichotomous* (Subramaniam, dkk., 2009). Persamaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Logit (RMC)} = \alpha + \beta 1 (\text{UDK}) + \beta 2 (\text{Prop_KI}) + \beta 3 (\text{FRDK}) + \beta 4 (\text{Risk_LK}) + \beta 5 (\text{Kons_Kep}) + \beta 6 (\text{Uk.Prs}) + \beta 7 (\text{KAP}) + \varepsilon$$

Keterangan :

RMC	:	Variabel <i>dummy</i> , keberadaan struktur RMC dimana perusahaan yang memiliki RMC diberi nilai 1 dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki RMC
α	:	Konstanta
UDK	:	Ukuran Dewan Komisaris
Prop_KI	:	Proporsi Komisaris Independen
FRDK	:	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Risk_LK	:	Risiko Pelaporan Keuangan
Kons_Kep	:	Konsentrasi Kepemilikan
Uk.Pers	:	Ukuran Perusahaan
KAP	:	Variabel <i>dummy</i> , dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal dari KAP <i>Big Four</i> diberi nilai 1 dan 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan KAP <i>Big Four</i>
E	:	<i>Error</i>

4. HASIL DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif untuk seluruh perusahaan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari tabel dapat dilihat bahwa Ukuran Dewan Komisaris (UDK) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 4.438 dengan standar deviasi 1.8279. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel penelitian memiliki jumlah anggota dewan komisaris sebanyak 4 orang. Jumlah terbesar (maksimum) ukuran dewan komisaris yang dimiliki perusahaan sampel penelitian ada sebanyak 13 orang dan jumlah terkecil (minimum) sebanyak 2 orang. Standar deviasi 1.8279 menunjukkan bahwa data-data tersebut berkumpul disekitar daerah hitungnya yang dikarenakan penyebarannya tidak terlalu jauh dari rata-rata hitungannya.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Data Perusahaan Sampel

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
UDK	1225	2	13	4.44	1.828
PROP_KI	1225	20.0000	80.0000	39.909270	8.6204842
FRDK	1225	1	45	6.09	5.461
RISK_LK	1225	0.0010	0.8810	0.291601	0.2090089
KONS_KEP	1225	16.0400	99.1400	56.277999	17.9425372
UK_PERS	1225	22.6427	32.9970	28.152087	1.7523813
Valid N (listwise)	1225				

Proporsi Komisaris Independen (PROP_KI) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 39.9% dengan standar deviasi 8.6205. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel penelitian telah memiliki kurang lebih 39.9% proporsi Komisaris Independen dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Nilai rata-rata proporsi Komisaris Independen sebesar 39.9% telah memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 dan pada Peraturan Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 yang menyatakan pembentukan Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Proporsi Komisaris Independen yang paling besar (maksimum) adalah 80% dimana dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris 4 (empat) diantaranya Komisaris Independen. Sedangkan proporsi Komisaris Independen paling rendah adalah 20%. Standar deviasi 8.6205 menunjukkan bahwa data-data tersebut berkumpul disekitar daerah hitungnya, yang dikarenakan penyebarannya tidak terlalu jauh dari rata-rata hitungnya.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 6.09 dengan standar deviasi 5.461. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel penelitian melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun. Jumlah rapat dewan komisaris paling banyak (maksimum) adalah 45 (empat puluh lima) kali dan jumlah paling sedikit adalah 1 (satu) kali dalam setahun. Standar deviasi 5.461 menunjukkan bahwa data-data tersebut berkumpul disekitar daerah hitungnya, yang dikarenakan penyebarannya tidak terlalu jauh dari rata-rata hitungnya.

Risiko Pelaporan Keuangan (RISK_LK) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 0.29160 dengan standar deviasi 0.2090. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel penelitian menghadapi risiko atas pelaporan keuangan yang melibatkan persediaan dan piutang usaha terhadap total asset sebesar 29.16%. Rasio paling rendah (minimum) adalah 0.1% dan yang paling tinggi (maksimum) adalah 88,1%.

Konsentrasi Kepemilikan (KONS_KEP) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 56.3% dengan standar deviasi 17.9%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya konsentrasi pemegang saham mayoritas pada perusahaan sampel penelitian sebesar 56.3%. Konsentrasi kepemilikan paling rendah (minimum) adalah 16.04% dan yang paling tinggi (maksimum) adalah 99.14%. Standar deviasi 17.94% menunjukkan bahwa data-data tersebut berkumpul disekitar daerah hitungnya yang dikarenakan penyebarannya tidak terlalu jauh dari rata-rata hitungnya.

Ukuran Perusahaan (UK_PERS) memiliki nilai rata-rata (*Means*) sebesar 28.1520 dengan standar deviasi 1.7524, nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki nilai ukuran perusahaan yang bervariasi (Puspaningrum, 2013). Rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa

rata-rata setiap perusahaan sampel penelitian memiliki *log* ukuran perusahaan sebesar 28.1520. Nilai tertinggi untuk *log* ukuran perusahaan adalah 32.9970 dan memiliki nilai terendah 22.6427.

Dalam penelitian ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan sampel penelitian diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Non Big Four*. KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *Big Four* diantaranya *Ernst & Young*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, dan *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*. Perusahaan sampel penelitian yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* sebanyak 506 perusahaan atau 41.31% dari total perusahaan sampel, sedangkan perusahaan sampel penelitian yang menggunakan jasa auditor eksternal yang berafiliasi dengan KAP non *Big Four* sebanyak 719 perusahaan atau 58.69% dari total sampel perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.3 menampilkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan logistik regression. Dapat dilihat dari tabel, variabel ukuran Dewan Komisaris (UDK) menunjukkan koefisien negatif sebesar 0.013 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.394. Nilai signifikansi yang berada diatas 0.05 menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan ukuran Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC, dimana semakin besar ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan non finansial maka semakin rendah kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, ukuran Dewan Komisaris cenderung tidak mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian, H1 tidak terdukung secara statistik.

Tabel 4.3

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

	<i>B</i>	<i>S.E.</i>	<i>Wald</i>	<i>df</i>		<i>Sig/2</i>	<i>Exp(B)</i>	Keterangan
UDK	-0.013	0.048	0.073	1	0.788	0.394	0.987	Ditolak
PROP_KI	-0.003	0.009	0.100	1	0.752	0.376	0.997	Ditolak
FRDK	0.033	0.013	6.914	1	0.009	0.0045	1.034	Diterima
RISK_LK	-0.899	0.407	4.894	1	0.027	0.0135	0.407	Ditolak
KONS_KEP	0.013	0.004	9.573	1	0.002	0.001	1.013	Diterima
UK_PERS	0.457	0.063	52.914	1	0.000	0.000	1.579	Diterima
KAP	0.146	0.159	0.845	1	0.358	0.179	1.157	Ditolak
Constant	-14.909	1.702	76.771	1	0.000	0.000	0.000	

Dari tabel 4.3 terlihat variabel proporsi Komisaris Independen menunjukkan koefisien negatif sebesar 0.003 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.376. Nilai signifikansi yang berada diatas 0.05 menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan proporsi Komisaris Independen terhadap pembentukan RMC, dimana semakin besar proporsi Komisaris Independen pada perusahaan non finansial maka semakin rendah kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, proporsi

Komisaris Independen cenderung tidak mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian H2 terdukung secara statistik.

Variabel frekuensi rapat Dewan Komisaris menunjukkan koefisien positif sebesar 0.033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0045. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0.05 menunjukkan ada pengaruh signifikan frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC, dimana semakin tinggi frekuensi rapat Dewan Komisaris pada perusahaan non finansial semakin tinggi kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik frekuensi rapat Dewan Komisaris cenderung mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian, H3 terdukung secara statistik.

Variabel risiko pelaporan keuangan menunjukkan koefisien negatif sebesar 0.899 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0135. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0.05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara negatif risiko pelaporan keuangan terhadap pembentukan RMC, dimana semakin meningkatnya risiko pelaporan keuangan pada perusahaan non finansial semakin rendah kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik risiko pelaporan cenderung tidak mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian, H4 tidak terdukung secara statistik.

Variabel konsentrasi kepemilikan menunjukkan koefisien positif sebesar 0.013 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0.05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara positif konsentrasi kepemilikan terhadap pembentukan RMC, dimana semakin besar konsentrasi kepemilikan pada perusahaan non finansial semakin tinggi kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik konsentrasi kepemilikan cenderung mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian, H5 terdukung secara statistik.

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan koefisien positif sebesar 0.457 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0.05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara positif ukuran perusahaan terhadap pembentukan RMC, dimana semakin besarnya ukuran perusahaan pada perusahaan non finansial semakin tinggi kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik ukuran perusahaan cenderung mempengaruhi pembentukan RMC, H6 terdukung secara statistik.

Variabel reputasi auditor menunjukkan koefisien positif sebesar 0.146 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.179. Nilai signifikansi yang berada diatas 0.05 menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan secara positif reputasi auditor terhadap pembentukan RMC, dimana penggunaan jasa KAP yang berafiliasi *Big Four* pada perusahaan non finansial semakin rendah kemungkinan perusahaan membentuk RMC. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik reputasi auditor cenderung tidak mempengaruhi pembentukan RMC. Dengan demikian, H7 tidak terdukung secara statistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik *Corporate Governance* (GC) yang terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, frekuensi rapat Dewan Komisaris, dan pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari risiko pelaporan keuangan, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan serta pengaruh karakteristik pengendalian eksternal yaitu reputasi auditor terhadap pengungkapan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia dari tahun 2008 hingga 2013 dengan jumlah sampel 1225 perusahaan, yang terdiri dari 267 perusahaan yang memiliki RMC dan 958 perusahaan yang tidak memiliki RMC, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Indira (2012), Ratnawati (2012), Puspaningrum dan Sugeng (2013) serta Safitri dan Wahyu (2013).
2. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subramaniam, dkk., (2009), Andarini dan Indira (2012) dan Puspaningrum dan Sugeng (2013).
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyarini (2011), Kusuma (2012) serta Wahyuni dan Puji (2012).
4. Risiko Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Indira (2012), Diani (2013) dan Puspaningrum dan Sugeng (2013).
5. Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utomo (2012) dan Sari (2013).
6. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Indira (2012), Ratnawati (2012) serta Wahyuni dan Puji (2012).
7. Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andarini dan Indira (2012), Ratnawati (2012) dan Kusuma (2012).

Saran

Berdasarkan keimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat digunakan penelitian selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC), misalnya umur *listing* perusahaan di BEI, ukuran Komite Audit, latar belakang pendidikan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, kompleksitas dan tipe industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Nurseto. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya Terhadap Asimetri Informasi. Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro
- Andarini, Putri Wahyu dan Indira Januarti. 2012. "Hubungan karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan *Go Public* Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.9, No.1.

- Anisa, Windi Gessy. 2012. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris Pada Laporan Tahunan Perusahaan-perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010)". Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro
- Bates, William dan Robert J. Leclerc. 2009. "Boards of directors and Risk Committees". The Corporate Advisor, Vol.17, No.6
- Courtemanche, Gil. 2001. "Pandangan Baru : Internal Auditing". Yogyakarta : Kanisius
- Darmawi, Herman. 2004. Manajemen Risiko. Jakarta : Bumi Aksara
- Diani, Yosephine Endah. 2013. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risk Management Committee". Accounting Analysis Journal (AAJ) 2, (2), (2013)
- Dyaksa, Harish Pradipta. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Risk Management Committee". Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro
- Forum for Corporatein Indonesia. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II. Jakarta : FCGI
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, Rosmi Nurul. 2013. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee (RMC)". Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor : Kep-29/PM/2004. Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor : Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor : Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan usaha Milik Negara (BUMN).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta : KNKG

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance. Jakarta : KNKG
- Kusuma, Chandra Setya Kusuma. 2012. “Dampak Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Strukturisasi *Risk Management Committee* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Finansial yang *Listing* di BEI tahun 2008-2010”. Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro.
- Meizaroh dan Jurica Lucyanda. 2011. “Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan *Enterprise Risk Management*”. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Banda Aceh, 21-22 Juli 2011.
- Meythi dan Lusiyana Devita. 2011. “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Empirik Pada Perusahaan Go Publik yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.3, No.1
- Nuryaman. 2008. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba”. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak
- Nuswandari, C. 2009. “Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 16 (2), 70-84.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik. Jakarta : OJK.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Nomor X.K.6 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tentang Persediaan
- Pratika, Briana Dita. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan *Risk Management Committee* Terhadap Manajemen Risiko. Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro Semarang

- Puspaningrum, Mona Ajeng dan Sugeng Pamudji. 2013. "Determinan Keberadaan *Risk Management Committee* Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.2
- Putri, Enesti Eka. 2013. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Reputasi Auditor dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Dimensi COSO ERM Framework). Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ratnawati, Andalan Tri. 2012. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.26, No.2,
- Safitri, Ana Khusnun dan Wahyu Meiranto. 2013. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee*". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.4.
- Sambera, Gea Fatah dan Wahyu Meiranto. 2013. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pembentukan Komite Manajemen Risiko". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.3
- Sari, Fuji Juwita. 2013. "Implementasi *Enterprise Risk Management* Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Lag". *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2, (2), (2013).
- Setyarini, Yudiati Indah. 2011. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristika Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee*". Skripsi. Program Studi Akuntansi : Universitas Diponegoro
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima. Jakarta : Fakultas Ekonomi universitas Indonesia.
- Subramaniam, dkk., 2009. "*Corporate Governance, Firm Characteristics and Risk Management Committee Formation in Australian Companies*". *Managerial Auditing Journal*, Vol.24, No.4, pp. 316-339.
- Sulistyanto, Sri dan Clara Susilawati. 2010. *Metode Penulisan Skripsi*, Edisi 7. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syifa'. Layyinatasy. 2013. "Determinan Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2, (3), (2013).
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management : Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan *Go Public* Sektor Manufaktur)". Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Utomo, Dito Firmanda. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee* (RMC)". Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang

Wahyuni, Tri dan Puji Harto. 2012. "Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan karakteristik Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko". Diponegoro Journal of Accounting, Vol.1, No.2

Wulandari, Paramastri. 2012. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pembentukan *Risk Management Committee*". Skripsi. Universitas Diponegoro

Yatim, Puan. 2009. *Board Structure and The Establishment of A Risk Management Committee by Malaysian Listed Firms*. Malaysian Accounting Review.